

# PERAN AUNG SAN SUU KYI DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI MYANMAR

NUR ARIE HIDAYAT

20120510479

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[nurariehidayat@gmail.com](mailto:nurariehidayat@gmail.com)

## Abstract

*The country of Myanmar has adopted a system of military rule since the coup of Ne Win in 1988. Since the military junta took over the power system, many policies have been taken to the detriment of the people. Communities that have not been able to withstand adverse decisions finally take action to voice their dissatisfaction with the government. Aung San Suu Kyi who was disappointed with the treatment of the military junta government against demonstrators ventured to plunge into politics in her own country. Conducting non-violent protests is a method taken by Aung San Suu Kyi to fight the actions of the military junta. In the 1990 elections the party founded by Aung San Suu Kyi, the NLD won, but the government did not recognize the victory and made Aung San Suu Kyi under house arrest. But the intention to make Myanmar a democratic country is not lost even though Aung San Suu Kyi is under house arrest and there is increasing support from the people of Myanmar and the international community.*

*Keyword: Junta Militer, Aung San Suu Kyi, Myanmar*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan militer Myanmar dimulai sejak kudeta yang dilakukan oleh jenderal Ne Win. Munculnya kekuatan militer dalam sistem politik Myanmar menggeser pelaksanaan sistem demokrasi parlementer yang telah diterapkan sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948.<sup>1</sup> Sejak adanya peralihan kekuasaan militer ini, seluruh aspek kehidupan diambil alih oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan dan ekonomi.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, junta militer yang dipimpin oleh jenderal Ne Win cenderung membuat Myanmar menutup diri dari pihak asing sesuai dengan kebijakan isolasi yang diterapkannya. Pengendalian penuh militer dalam segala aspek banyak merugikan masyarakat, pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah junta militer menimbulkan kemarahan dunia internasional. Banyak sanksi yang diberikan oleh dunia internasional kepada Myanmar, seperti penghentian semua bantuan dan pinjaman kepada pemerintah Myanmar yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

---

<sup>1</sup> Tom Kramer, "Ending 50 years military rules, prospect for peace, democracy, and development in Burma" (Norwegian Peacebuilding Resource center (NOREF) report, November (2012) hal 1-4

Aung San Suu Kyi yang merasa kecewa akan tindakan junta militer yang begitu brutal membantai demonstran memutuskan untuk terjun kedalam politik pertamanya di Myanmar. Tanggal 8 Agustus 1988, ribuan orang turun ke jalan menuntut berakhirnya rezim militer. Demonstran berasal dari berbagai kalangan : pelajar, biksu, dosen, petani, pegawai negeri, bahkan artis. Tidak peduli tua ataupun muda, laki- laki atau perempuan semuanya membanjiri jalanan di Rangoon.

Aung San Suu Kyi dianggap sebagai sosok yang paling cocok dan representatif sebagai seorang pemimpin sekaligus simbol rakyat Myanmar. Kenyataan bahwa Jendral Aung San yakni ayah dari Suu Kyi memang merupakan faktor yang paling dominan yang menjadikan Suu Kyi sebagai simbol perjuangan rakyat Myanmar mencapai demokrasi.

Dibesarkan dalam sebuah tradisi religi yang mengandung nilai- nilai moral tertentu kemudian tentu saja memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap perjuangan dalam melawan pemerintah junta militer. Aung San Suu Kyi seorang pejuang demokrasi yang konsisten dengan menggunakan strategi nir kekerasan dalam perjuangannya.

## **2. REZIM MILITER DALAM PEMERINTAHAN MYANMAR**

Myanmar mengalami pemerintahan sipil sejak kemerdekaan di tahun 1948-1958 dan dari 1960-1962, pemerintahan dikuasai oleh kubu militer di Myanmar. Kelompok militer yang dipimpin oleh jendral Ne Win melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh krisis politik yang meningkat dalam pemerintahan U Nu akibat perpecahan dalam partai Anti-Facist People's Freedom League (AFPL). Demi menegakkan demokrasi dan mengembalikan pemerintahan ke pihak sipil, jendral Ne Win mengadakan pemilu di tahun 1960. Pemenang dalam adalah partai persatuan yang dipimpin U Nu, sehingga U Nu terpilih lagi menjadi perdana menteri. Tetapi pemerintahan U Nu digulingkan kembali pada tanggal 2 maret 1962. Jadi dalam hal ini terjadi perebutan kekuasaan antara politisi sipil dan militer. Yang akhirnya menyebabkan intervensi militer dalam politik bahkan dapat dikatakan sebagai dominan militer dalam politik.

Dalam prakteknya, ternyata rezim militer gagal dalam pemerintahan maupun membuat kebijakan yang berdampak baik bagi rakyat. Pemberontakan masih sering dijumpai dimana- mana. Selain itu, kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat sehingga mitos kegagalan politisi sipil terhadap kehidupan rakyat pun berkurang. Jadi, politisi militer justru menyebabkan kehidupan masyarakat semakin memburuk.

Dominasi militer yang kuat terlihat jelas dalam perjalanan sejarah Myanmar, pada tahun 1963-1964 Revolutionary Council melakukan nasionalisasi terhadap semua industri, bisnis, dan bioskop juga dinasionalisasi, asosiasi perpustakaan ditutup dan debat publik ditiadakan lagi. Rezim mengembangkan penelitian yang cermat untuk mengawasi seluruh penerbitan mencakup desain sampul majalah dan kalender. Pada tahun 1969, seluruh surat kabar swasta dinasionalisasikan atau digantikan dengan surat kabar yang dikontrol pemerintah.<sup>2</sup>

Pada tahun 1964, National Solidarity Act menghapus semua partai politik dan menyisakan satu partai politik yaitu Burma Socialist Program Party (BSSP) yang diperbolehkan untuk merekrut anggota. Bahkan pegawai negeri juga diminta untuk berpartisipasi dan mendukung partai tersebut. Pada tahun 1972, revolutionary Council memegang referendum konstitusi baru yang berdampak dimana dari tahun 1974 dan 1988, Myanmar berada dibawah satu partai saja yang dipimpin jendral Ne Win yang didukung oleh personel pejabat militer. Pada pertengahan tahun 1970-an, kelompok mahasiswa dan pelajar, pekerja pemerintah yang mengalami frustrasi akibat penurunan standar hidup melakukan protes terhadap pemerintah yang akhirnya menyebabkan pemerintah menggunakan kekuatan militernya untuk mengatasi gelombang massa.<sup>3</sup>

Peran militer dalam politik di Myanmar juga terlihat dari adanya State Development and Peace Council (SDPC) yang dibentuk sejak tahun 1997, sebelumnya SLORC bernama State Law and Order Restoration Council (SLORC). SLORC pada awalnya didirikan untuk memperbaiki kondisi politik di Myanmar.<sup>4</sup> Dengan sebutan apapun, lembaga yang merupakan kaki tangan rezim militer tersebut sampai sekarang belum menunjukkan peluang besar menuju rezim yang demokratis seperti kasus kemenangan NLD dalam pemilu 1990 yang diabaikan begitu saja. Ini berarti pihak militer tetap ingin mempertahankan hegemoninya.

Dari perspektif lainnya, Myanmar dapat dikatakan sebagai negara yang menganut pretorianisme jika dilihat dari format pemerintahan sipil – militernya. Pretorianisme dapat dilihat dari fenomena dimana militer menjadi aktor utama yang dominan menggunakan kekerasan atau setidaknya mengancam menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Pretorianisme sendiri mengacu pada suatu situasi dimana militer dalam suatu masyarakat

---

<sup>2</sup> Dewi, Mutiara Ita. *Pengalaman Militer Burma : Sebuah Analisis Historis- Politis*. Hal 6

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 6

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 6

tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom di dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau mengancam menggunakan kekuatan.<sup>5</sup>

Salah satu sisi hubungan sipil- militer yang menarik untuk disorot dalam pemerintahan adalah sistem kepartaian dalam kerangka hubungannya dengan tentara. Yang dimaksud disini yaitu partai sering digunakan oleh kelompok militer dalam mempertahankan dan memperkuat pengaruh serta hegemoni terhadap rakyat. Saat ini di Myanmar terdapat beberapa partai yaitu National League for Democracy (NLD) diketuai oleh Aung Shwe, sekretaris umum yaitu Aung San Suu Kyi, National Unity Party (NUP) diketuai oleh Tha Kyaw, Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) diketuai oleh U Khun Tun Oo, dan beberapa partai kecil. Jika pada era sebelumnya, pemerintahan jenderal Ne Win yang merupakan partai pemerintah adalah Burma Socialist Programme Party (BSP), partai tersebut merupakan satu- satunya yang mendominasi pemerintahan pada saat itu. Sedangkan sekarang, dimana ada kebebasan untuk mendirikan partai, maka partai NUP yang mendukung rezim untuk memperkuat kedudukannya. Keterlibatan militer dalam partai politik dapat juga dilihat dari negara seperti Cina, dimana partai komunis Cina sampai sekarang masih eksis dan besar peranannya. Memang antara kedua negara memiliki persamaan seperti sistem sosialisme yang berpengaruh terhadap kehidupan politik yang tidak memisahkan pemerintahan, kehidupan militer dan garis kepartaian.<sup>6</sup>

Selain menggunakan partai untuk memperkuat statusnya, rezim militer yang sering disebut sebagai Security Development and Peace Council (SDPC) juga menggunakan organisasi sosial politik untuk meraih massa sipil yaitu Union Solidarity and Development Association (USDA) sekretaris umum yaitu Than Aung. Selama ini, USDA memiliki fungsi untuk memobilisasi massa dan sekarang memiliki anggota sekitar 11 juta (35% dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas). USDA ini semacam Golkar di Indonesia pada zaman presiden Soeharto. Ketua USDA tersebut pemimpin SDPC, Jenderal Than Shwe dan sekretaris umumnya yaitu Than Aung. Sehingga peranan jenderal Than Shwe secara personal dalam pemerintahan Myanmar sangatlah besar karena menduduki beberapa jabatan sekaligus. USDA merupakan senjata ampuh untuk melawanya NLD, karena keanggotaannya direkrut dari semua pegawai pemerintah.

---

<sup>5</sup> Amos Perlmutter. *Militer dan Politik*. Jakarta : Rajawali Press. Hal 142

<sup>6</sup> Dewi, Mutiara Ita. *Pengalaman Militer Burma : Sebuah Analisis Historis- politis*. Hal 10-11

Dominasi militer dalam pemerintahan Myanmar yang relatif konstan dan tetap kemungkinan cukup jarang dijumpai di negara dunia ketiga. Padahal di negara dunia ketiga sering bertendensi pada dominasi militer yang tidak tetap atau mengalami pasang surut namun tetap terjadi pergeseran meskipun tidak bersifat radikal. Militer Myanmar sangat sulit untuk digeser oleh politisi sipil. Bahkan politisi sipil semacam Aung San Suu Kyi yang menyuarkan demokrasi justru menjadi tahanan rumah di negaranya sendiri, saat mencoba mengurangi pengaruh rezim militer. Memang kekuatan sipil tidak berkutik di Myanmar dapat dilihat pada zaman pemerintahan U Nu yang dikudeta oleh Ne Win. Jadi dalam rivalitas sipil- militer, selalu dimenangkan oleh pihak militer. Semua ini disebabkan oleh berbagai sektor kehidupan yang selalu diatur dan di hegemoni pemerintah. Rakyat sipil mau tidak mau harus menurut pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah rezim militer.

SDPC juga berusaha untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil melalui bermacam sektor seperti pendidikan, komunikasi, dll. Dalam bidang teknologi komunikasi misalnya pada tahun 2001 hanya ada 11 saluran telepon untuk 2000 penduduk, sedangkan biaya telepon nirkabel pun sangat mahal sehingga jarang dimiliki. Dari hal ini dapat dilihat bahwa menjadi masyarakat sipil di Myanmar itu kurang sejahtera. Walaupun masyarakat sipil melakukan protes ataupun unjuk rasa terhadap pemerintah, militer menghadapi aksi protes masyarakat dengan jalan kekerasan.

Sampai saat ini, kekuatan militer di Myanmar tentu saja masih sangat kuat, walaupun kelompok militer tidak disukai oleh rakyat. Dalam pemerintah militer yang penting adalah supaya mereka tetap bisa eksis dipemerintahan dan justru tidak memberikan peluang terhadap sipil dalam pemerintahan, dengan sebab pengalaman pemerintahan sipil di tahun- tahun sebelumnya yang gagal dalam memecahkan persoalan. Jadi masyarakat pun terkadang terpaksa memasuki kancah militer agar mendapatkan posisi yang strategis di segala sektor pemerintahan.

Menurut data yang tersedia, jumlah personel militer di tahun 1998 yaitu sekitar 450.000 jiwa sehingga 2 kali lebih besar dibandingkan tahun 1988. Jumlah Tatamadaw sebutan tentara Myanmar menduduki urutan ke-2 terbesar di Asia Tenggara setelah Vietnam. Ditahun 2001 jumlah tentara militer meningkat menjadi 550.000 jiwa yang terdiri dari 460.667 personil laki- laki dan 479.691 personil perempuan.<sup>7</sup> Jumlah personil militer terus

---

<sup>7</sup> Diakses dari CIA – The world Factbook, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>

meningkat kemungkinan juga disebabkan oleh anggaran pemerintah di bidang militer yang cukup lumayan yaitu US \$ 39 dari GNP. Dengan anggaran militer tersebut maka kemungkinan kehidupan militer bisa lebih menjanjikan dibandingkan kehidupan sipil, sehingga tiap tahun selalu terjadi peningkatan.

Kekuatan rezim militer SDPC ini dapat dilihat pula dari tokoh- tokoh utama yang memainkan peranan di sana. Tokoh- tokoh tersebut yaitu Jendral senior Than Shwe sebagai ketua SDPC, Panglima Besar Tatmadaw, Kepala Negara, Perdana Menteri dan menteri pertahanan. Dengan jabatan yang bermacam- macam ini kemungkinan menyebabkan pembuatan keputusan menjadi jauh menuju demokrasi atau bahkan sepihak saja. Hal ini disebabkan karena kepentingan jabatan yang satu mempengaruhi jabatan lainnya. Sehingga peran atau tugas- tugas menjadi berjalan kurang maksimal.

Meninjau kekuatan militer Myanmar dalam realitasnya baik dalam maupun luar rezim memang sulit digoyahkan. Dengan semakin meningkatnya jumlah personil militer tiap tahun maka kekuatan luar rezim semakin kuat. Dengan adanya tokoh- tokoh dalam rezim yang ketat pun menyebabkan kekuatan militer semakin kuat. hal ini dapat diamati dari contoh National Convention 9 Januari 1993 yang menjelaskan tentang kontrol militer terhadap dewan eksekutif dan legislatif yaitu dengan menduduki 25% pejabat Tatmadaw dalam parlemen, 110 dari 440 kursi di Majelis rendah (Pyithu Hluttaw) dan 56 dari 224 kursi di majelis tinggi. Jika kursi- kursi penting dikuasai terus oleh militer tetap terjaga. Hanya saja entah semakin menguat atau melemah tergantung pada parameter apa yang digunakan.

### **3. AUNG SAN SUU KYI SEBAGAI SIMBOL DEMOKRASI MYANMAR DAN STRATEGI DALAM MENGAHADAPI JUNTA MILITER**

Aung San Suu Kyi adalah anak dari Jendral Aung San yang dibunuh oleh lawan politiknya sebelum Myanmar di nyatakan merdeka dari Inggris. Suu Kyi pernah menempuh pendidikan di sekolah katolik Inggris di Myanmar, tempat ia menghabiskan sebagian masa kecilnya. Ibu Aung San Suu Kyi, Khin Kyi, memperoleh kehormatan sebagai tokoh politik dalam pemerintahan saat baru dibentuk. Daw Khin Kyi pernah menjabat sebagai duta besar Myanmar di India pada 1960. Aung San Suu Kyi tinggal bersama Khin Kyi Ma di India hingga ia lulus dari Lady Shri Ram College di New Delhi pada 1964.

Kemunculan Aung San Suu Kyi yang menggemparkan pada akhir tahun 1980-an menyedot perhatian internasional. Keberaniannya menempatkan diri sebagai oposisi militer membuat Suu Kyi menjadi simbol perjuangan rakyat Myanmar. Seperti halnya para politisi perempuan terkenal lainnya seperti Benazir Bhutto, Corazon Aquino dan Sonia Gandhi yang ayah dan suami- suaminya dibunuh oleh pihak lawan, Suu Kyi mewarisi karisma yang diturunkan oleh ayahnya, Jenderal Aung San yang kala itu juga dibunuh oleh lawan politiknya. Sejak kemunculannya pertama kali ketika Suu Kyi pulang ke negaranya, ia telah mendapatkan tempat tersendiri di hati rakyat Myanmar. Meskipun begitu, kepopuleran Suu Kyi tidak semata- mata karena membawa nama ayahnya.

Walaupun di dalam struktur organisasi NLD Suu Kyi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, namun namanya lebih populer daripada Aung Gyi. Kemunculan pertama kali di Shwe Dagon Pagoda, ditengah- tengah gencarnya gelombang protes rakyat melawan pemerintah. Kehadirannya pada waktu itu menarik keingintahuan rakyat Myanmar. Rakyat Myanmar harus bersatu dan menggunakan cara- cara yang damai dalam mencapai tujuan mereka yaitu terwujudnya negara yang menganut sistem demokrasi.

Mewarisi karisma heroik ayahnya yang merupakan pejuang kemerdekaan, memiliki intelektual tinggi dan keberanian berada di sisi yang bersebrangan dengan rezim militer membuatnya dengan cepat menarik simpatik rakyat Myanmar yang menganggap kemunculannya sebagai sebuah harapan baru. Bentuk dukungan yang secara terang- terangan dilakukan rakyat Myanmar salah satunya ketika ibu Suu Kyi yaitu Khin Kyi meninggal dunia. Sebanyak 100.000 rakyat Myanmar melakukan *long March* menuju pemakaman dengan membawa bendera dan spanduk NLD serta menyanyikan lagu- lagu bernada anti pemerintah.

Berdasarkan pendidikan dan kemampuan menulisnya, serta pengalaman di PBB, Jepang, India, dan negara bagian pegunungan Himalaya dan pengamatannya di Myanmar, Suu Kyi memberikan komentar dan kritik atas pemerintahan militer dan mengemukakan alternatif untuk kembali kepada gagasan ayahnya. Aung San Suu Kyi berbekal keahlian dan pengalamannya di bidang politik, Suu Kyi melangkah ke dalam revolusi pada tahun 1988. Aung San Suu Kyi tidak pernah berharap bahwa rakyat Myanmar akan cepat menerimanya, karena pada awal menuntut pembentukan pemerintahan sementara yang adil untuk mengawasi pemilihan umum, yang di dalamnya rakyat bebas membentuk partai, memilih pemimpin dan memperjuangkan kekuasaan. Dengan tajam Aung San Suu Kyi mengecam perlakuan junta militer yang mengganggu dan menahannya, ketika melakukan perjalanan ke daerah- daerah, dan Suu Kyi menggambarkan pemerintah tersebut sebagai Fasis, dan

melakukan pergerakan terhadap dengan damai. Pada bulan Juni 1989, secara terbuka Suu Kyi menuduh Ne Win sebagai pemimpin dari semua penderitaan rakyat dan merusak segala sesuatu yang telah direncanakan terhadap orang-orang berkuasa dan Ne Win sebagai kekuatan di belakangnya.

Tuntutan sebenarnya muncul pada tanggal 19 Juli 1989, didalam peringatan hari martir yang secara tradisional mengenang jasa Aung San dan kabinetnya. Pihak militer telah mengatur upacara tersebut dengan mengundang Aung San Suu Kyi untuk bergabung dengan para pemimpin negara yang datang untuk memperingati peristiwa tersebut, namun Aung San Suu Kyi menolak dan mengatakan bahwa dia ingin menghormati ayahnya dengan caranya sendiri. Dalam menghadapi serangkaian kejadian kejahatan tersebut, Aung San Suu Kyi membatalkan kunjungan upacara peringatan tersebut guna mencegah pertumpahan darah, setelah mengetahui banyak mahasiswa yang menyertainya.

Pada tanggal 20 Juli 1989, pihak junta militer menyerang para mahasiswa dan Aung San Suu Kyi ketika kampanye. Pihak junta militer kembali melakukan penyerangan terhadap Aung San Suu Kyi ketika ia melakukan tur ke daerah Depayin, Myanmar utara pada 30 Mei 2003. Iring-iringan tersebut diserang oleh ribuan massa yang dicurigai pendukung SPDC dan *Union Solidarity and Development Association (USDA)*. Diperkirakan sebanyak 100 hingga 282 pendukung dan anggota NLD tewas dalam penyerangan tersebut.

Hal yang paling menarik dari perjuangan Aung San Suu Kyi dalam menegakan demokrasi di Myanmar adalah keberanian dan kegigihannya dalam melawan rezim militer dengan menggunakan cara-cara damai yang pada akhirnya membuat rakyat Myanmar berani berperan serta dalam gerakan pro demokrasi yang dipimpinnya. Secara konsisten Suu Kyi memperjuangkan demokrasi meskipun rezim militer menempatkannya dalam tahanan rumah yang membatasi segala bentuk pergerakannya. Dukungan rakyatpun tidak pernah surut. Akan tetapi, meskipun Suu Kyi membawa nama besar Ayahnya, bukan berarti ia tidak menemui hambatan dalam proses perjuangan. Oleh karena itu Suu Kyi mengambil pendekatan-pendekatan dengan cara damai untuk menghilangkan pengaruh doktrin militer dan menumbuhkan semangat perlawanan dari rakyat.

Pada awal keterlibatannya dalam revolusi Myanmar, beberapa politisi senior termasuk U Nu menawarkan Suu Kyi bergabung dengan partai mereka, namun Suu Kyi memilih bergabung dengan Aung Gyi dan Tin Oo membentuk NLD.

Faktor penting menggambarkan Aung San Suu Kyi adalah aktor dari gerakan pro demokrasi yang cukup kuat, pada saat kebebasannya dari statusnya sebagai tahanan rumah. Pemerintah mengambil langkah membebaskan Suu Kyi adalah karena pertama, pemerintah



mengakui bahwa tanpa adanya dukungan dari Aung San Suu Kyi, Myanmar tidak mampu meningkatkan masuknya aliran investasi asing, dana bantuan pembangunan dari negara lain dan perdagangan internasional, yang mana hal tersebut dapat membantu menopang perekonomian negara Myanmar.

Partai oposisi Nasional Liga Demokrasi (NLD) didirikan pada tanggal 24 september 1988. Tokoh pendiri partai yaitu Aung San Suu Kyi, mantan Jenderal U Tin Oo, dan mantan Jenderal lain Aung Gyi . Aung Gyi dipandang pandai berbisnis dan pendukung pasar bebas. Dia putus hubungan dengan Ne Win karena protes kebijakan ekonomi yang membangkrutkan negara. Keahlian bisnisnya menjadi aset bagi NLD.<sup>8</sup>

Suu Kyi diberi kehormatan dicalonkan sebagai sekretaris jenderal partai meskipun ada orang- orang yang lebih senior. Dia adalah pendatang baru, pemula didunia politik, namun dia adalah putri dari Aung San.<sup>9</sup>

NLD merupakan partai pro demokrasi yang mendukung gerakan non kekerasan terhadap proses demokrasi multi partai di Myanmar. Partai ini juga mendukung hak asasi manusia seperti kebebasan berpidato di depan umum, aturan hukum, dan rekonsiliasi nasional. Tujuan utama didirikannya partai NLD, adalah adanya keinginan untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis. NLD yang paling besar menyuarakan aspirasinya di antara partai lainnya. NLD sering mendapat pertentangan dari pihak pemerintah. Melalui sebuah perencanaan politik yang lebih luas, NLD telah menarik sebagian masyarakat Myanmar dalam menyerukan demokrasi yang adil di Myanmar. NLD juga semakin menonjol ketika Aung San Suu Kyi memimpin organisasi tersebut, dikarenakan Aung San Suu Kyi merupakan salah satu putri pahlawahan nasional Myanmar. Pada tahun 1989 NLD semakin kuat dalam melawan militer yang semakin brutal menghadapi para demonstran.

Meskipun bahaya selalu mengintai selama kampanye, ada momen- momen menyenangkan dan persahabatan saat pendukung NLD menyampaikan pesannya ke seluruh negeri. Pengajar sejarah Nyo Ohn Myint akhirnya mau terus bergabung dengan gerakan demokrasi daripada kembali mengajar di Universitas Rangoon. Dia membantu mengorganisasikan gerakan pemuda NLD dan sering bersama- sama mahasiswa menjadi pengawal Suu Kyi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pederson, Rena. *Tha Burma Spring Aung San Suu kyi dan Perjuangan Demi Jiwa Bangsa*. 2016. Jakarta. KakiLangit Kencana. Hal. 64

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 64

<sup>10</sup> Pederson, Rena. *Tha Burma Spring Aung San Suu kyi dan Perjuangan Demi Jiwa Bangsa*. 2016. Jakarta. KakiLangit Kencana. Hal. 70

matahari. Banyak orang keluar untuk mendengar pidatonya meski ada gangguan terus menerus dari tentara.<sup>13</sup>

Suu Kyi mulai berkampanye dengan menulis surat ke Persatuan Bangsa- Bangsa dan Amnesty Internasional. Suu Kyi melaporkan bahwa junta militer membunuh para biksu di jalan. Suu Kyi menulis bahwa mahasiswa ditangkap, ditelanjangi, dan digunakan budak sebagian sebagai penyapu ranjau untuk militer. Suu Kyi juga meminta kelompok hak asasi manusia untuk mendesak PPB agar mengintervensi. Suu Kyi juga mengirimkan protes secara resmi kepada pemimpin SLORC tentang kekerasan dan meminta dilakukan dialog dengan para jenderal, namun tidak ada jawaban.<sup>14</sup>

Suu Kyi mengajak rakyat untuk berbicara atas nama mereka sendiri. Banyak dari penduduk desa telah hampir kehilangan semangat karena ditindas selama beberapa dekade sehingga mereka merasa sistem demokrasi di Myanmar adalah hal yang mustahil. Suu kyi meyakinkan mereka bahwa demokrasi mungkin terwujud apabila mereka mengatasi ketakutannya dan ikut terlibat. Mulai dari ratusan, sampai ribuan orang, perlahan- lahan bergabung dengan NLD. Suu Kyi sudah belajar bahwa menjadi pemimpin berarti mengajak orang untuk keluar dari persembunyiannya.<sup>15</sup>

Setelah ibunya meninggal dunia, Suu Kyi melakukan kampanye lebih sering. Selama 13 hari berturut- turut, dia berkampanye lebih dari 50 desa. NLD menggunakan topi khas petani yang dibuat dari jemari *kamauk*, sebagai simbol untuk menunjukkan dukungan mereka kepada para petani dan pekerja serabutan yang telah lama hidup miskin dan menderita.<sup>16</sup>

Karena mengetahui bahwa nama ayahnya masih dikenal dan dihormati diseluruh Myanmar, Suu Kyi sering menggunakan kampanye demokrasi ayahnya ke dalam pidato- pidatonya. Dia menekankan bahwa setiap individu harus dihormati hak asasinya, setiap orang berhak memiliki suara di pemerintahan.<sup>17</sup>

Semakin banyak pidato yang disampaikan, semakin lama pesan- pesan Suu Kyi berkembang menjadi rumusan baru : pembaruan spiritual + pembaruan politik = kebebasan. Suu Kyi juga menegaskan bahwa Myanmar bukan hanya butuh demokrasi, tetapi juga perlu membangkitkan kembali nilai- nilai tradisi seperti kehormatan, amanah, dan keimanan. Suu Kyi melihat bahwa kekuasaan militer telah melakukan banyak penyelewengan. Suu Kyi

---

<sup>13</sup> Pederson, Rena. *Tha Burma Spring Aung San Suu ky dan Perjuangan Demi Jiwa Bangsa*. 2016. Jakarta. KakiLangit Kencana. Hal. 65

<sup>14</sup> *ibid.* Hal. 65-66

<sup>15</sup> Pederson, Rena. *Tha Burma Spring Aung San Suu ky dan Perjuangan Demi Jiwa Bangsa*. 2016. Jakarta. KakiLangit Kencana. Hal. 66

<sup>16</sup> *ibid.* Hal. 70

<sup>17</sup> *ibid.* Hal. 71

meyadari bahwa menggapai dan mempertahankan kebebasan membutuhkan konsep tradisional yakni *kebajikan personal*. Suu Kyi berpesan kepada pendukung untuk memahami jika militer tidak memaksakan kekuasaannya, maka orang harus siap *mengatur diri* dan hal ini akan membutuhkan nilai-nilai moral. Dia mengingatkan bahwa itu adalah kewajiban rakyat.<sup>18</sup>

Pada tanggal 8 November 2015 Myanmar menggelar pemilihan umum berlangsung terbuka pada pertama kali setelah dominasi militer yang hampir 50 tahun berkuasa. pada pemilu tahun 1990 NLD mendapatkan suara terbanyak namun hasil tersebut dianulir oleh junta militer dengan alasan undang-undang yang mengatur pemilu belum kuat, lalu Aung San Suu Kyi ditangkap dan dijadikan tahanan rumah karena dianggap “membahayakan negara” atas perlawanannya terhadap pemerintahan otoriter junta militer. Lalu, Aung San Suu Kyi resmi dibebaskan dari tahanan rumah pada 13 November 2010. Berdasarkan hasil dari *Union Election Commission*, partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mendapatkan perolehan suara lebih dari 80% dan memberikan kemenangan mutlak pada partai NLD yang sekaligus mengakhiri periode pemerintahan junta militer. Partai NLD menang telak atas 90 partai lainnya, dengan mengamankan 77 persen kursi di semua majelis di parlemen Myanmar, dengan total 887 kursi dari 1.150 kursi yang diperebutkan (termasuk pemilu daerah). Ini merupakan kemenangan yang besar bagi Aung San Suu Kyi dan partainya.

Namun, meskipun partai Aung San Suu Kyi menang, Aung San Suu Kyi tidak diperbolehkan menjadi presiden karena dalam konstitusi Myanmar pada pasal 59(f)2 melarang siapa pun yang memiliki pasangan dan anak berkewarganegaraan asing untuk menjadi presiden.<sup>19</sup> Lalu, posisi presiden digantikan oleh orang kepercayaan Aung San Suu Kyi di partai NLD yaitu Htin Kyaw. Sedangkan Aung San Suu Kyi, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Kantor Presiden, dan Penasehat Negara.

Selanjutnya, meski menang telak, transisi pemerintahan akan berjalan lancar jika partai NLD dapat menjalin hubungan yang baik dengan militer. Hal ini dikarenakan, dalam pemerintahan semi-militer Myanmar, militer mendapatkan 25% jatah kursi parlemen, dan memiliki hak veto dalam perumusan perubahan undang-undang karena konstitusi bisa

---

<sup>18</sup> *ibid.* Hal. 71

<sup>19</sup> Konstitusi Myanmar tahun 2008 pasal 59 (f): *shall he himself, one of the parents, the spouse, one of the legitimate children or their spouses not owe allegiance to a foreign power, not be subject of a foreign power or citizen of a foreign country. They shall not be persons entitled to enjoy the rights and privileges of a subject of a foreign government or citizen of a foreign country.* Dalam [https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar\\_2008.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en), hal. 18, diakses pada 17 november 2018

diamandemen dengan adanya persetujuan dari junta militer. Selain itu, dalam undang-undang yang disahkan pada rezim junta militer, sejumlah posisi penting seperti kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan kementerian perbatasan, serta wakil presiden dikuasai oleh wakil dari junta militer. Lebih lanjut, pasca kemenangan partai NLD pada pemilu tahun 2015 hubungan antara Aung San Suu Kyi beserta partainya dengan pihak junta militer terbilang baik dengan diterimanya hasil pemilu, dan junta militer menyatakan akan bekerjasama dengan pemerintahan sipil untuk berjalannya transisi demokrasi Myanmar. Namun, junta militer menolak adanya demokrasi penuh di Myanmar karena menurutnya junta militer perlu melindungi dan mengawasi penerapan demokrasi yang terbilang baru di Myanmar untuk menjaga perdamaian.

#### 4. KESIMPULAN

Myanmar yang sudah menerapkan sistem pemerintahan militer sejak kudeta jenderal Ne Win dari pemerintahan sipil U Nu terus menerus berusaha untuk mempertahankan hegemoninya dengan cara melakukan peraturan- peraturan yang dianggap berat sebelah atau merugikan bagi masyarakat Myanmar. Tapi ada satu tokoh yang berani menentang pemerintahan militer demi membawa Myanmar ke pemerintahan yang demokrasi. Tapi semua itu bukan tanpa hambatan, Aung San Suu Kyi terus menerus dirugikan dengan keputusan- keputusan yang dibuat oleh junta militer. Hasil pemilu di tahun 1990 dimana partai NLD memenangkan pemilu tetapi dibatalkan oleh pemerintah Junta militer dan Suu Kyi dijadikan sebagai tahanan rumah.

Dengan banyaknya rintangan yang dilalui oleh Suu Kyi untuk melawan junta militer tidak menyurutkan niatnya sedikit pun. Terbukti dengan kemenangan NLD pada pemilu di Myanmar tahun 2015.



DIAN AZMAWATI, SIP., M.A

19710108200710 163 065

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Amos, P. (t.thn.). *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Pederson, R. (2016). *The Burma Spring Aung San Suu Kyi dalam Perjuangan Demi Jiwa Bangsa*. Jakarta: Kaki Langit Kencana.

### JURNAL /KARYA ILMIAH :

Myanmar's Tryst Quasi-Democracy. (2013). *Pereira Internasional* .

Dewi, I. M. (t.thn.). Pengalaman Militer Burma : Sebuah Analisis Historis- Politis.

Houtman, G. (1999). Mental Culture in Burmese Crisis politics. *Institute for the Study of Language and Culture of Asia Africa*, 289.

Tom, K. (2012). Ending 50 Years Military Rules, Prospect for Peace, Democracy and Development in Burma. *Norwegia Peace Building Resource Center (NOREF}*, 1-4.

### WEBSITE :

Konstitusi Myanmar tahun 2008 pasal 59 (f): *shall he himself, one of the parents, the spouse, one of the legitimate children or their spouses not owe allegiance to a foreign power, not be subject of a foreign power or citizen of a foreign country. They shall not be persons entitled to enjoy the rights and privileges of a subject of a foreign government or citizen of a foreign country*. Dalam [https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar\\_2008.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en), hal. 18, diakses pada 17 november 2018.

Diakses dari CIA – The world Factbook, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>